

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKjIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PERSPUTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Diharapkan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders

Tanggapan (*feedback*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Balikpapan, Maret 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,



SUTADI
Pembina Utama Muda

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. LKjIP juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders* pada setiap unit di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan garis besar sasaran yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan di bidang pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan, yang meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan minat baca masyarakat;
2. Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Masing-masing sasaran diturunkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya atas kontribusi masing-masing unit kerja yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Seluruh sasaran ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	10
2.	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Persen	15
3	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa

mendatang. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan memiliki tujuan dan sasaran seperti yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kota Balikpapan Tahun 2020. Hasil pengukuran Kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik.

Untuk pencapaian sasaran menunjukkan persentase pencapaian yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan persentase peningkatan kunjungan perpustakaan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan untuk mencari solusi agar di masa mendatang dapat dilakukan peningkatan kinerja dan dapat memenuhi target setiap sasaran program.

Balikpapan, Maret 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kota Balikpapan,

The image shows a circular official stamp of the City of Balikpapan, Indonesia, with the text "Pemerintah Kota Balikpapan" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUTADI

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
1.2.2 Struktur Organisasi	5
1.2.3 Sumber Daya Manusia.....	6
1.2.4 Aspek Strategis	8
1.3 Isu Strategis	8
1.4 Landasan Hukum	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan Strategis.....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	16
2.3.1 Rencana Anggaran.....	16
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	17
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.3 Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV.....	29
PENUTUP.....	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Tabel 1.2	Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	7
Tabel 1.3	Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.4	Kondisi Eksisting SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Per 31 Desember 2021	7
Tabel 1.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Rencana Strategis Dispustakar Tahun 2016-2021	13
Tabel 2.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dispustakar Tahun 2021	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dispustakar Tahun 2021	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dispustakar Tahun 2021	16
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dispustakar Tahun 2021	16
Tabel 3.1	Penilaian Atribut Akuntabilitas Instansi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2020	17
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021	19
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 dengan Tahun 2020	20
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021	21
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 dengan Tahun 2020	22
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021	22
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 dengan Tahun 2020	22

Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2021	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholder*, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai instansi Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2016-2021 dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, serta tidak kalah pentingnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kota Balikpapan.

1.2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok di atas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
4. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan pada lingkup perangkat daerah dan perpustakaan di lingkungan daerah;
6. Pengelolaan arsip inaktif dan statis;
7. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip pada tingkat daerah;
8. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya;
9. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
11. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.1.1 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
2. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

1. Penyusunan program;
2. Pengelolaan urusan keuangan;

3. Kepegawaian;
4. Rumah tangga kantor;
5. Perlengkapan;
6. Protokol;
7. Hubungan masyarakat;
8. Layanan informasi dan pengaduan;
9. Pembinaan pelayanan publik;
10. Kearsipan;
11. Surat menyurat; dan
12. Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Dinas;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
14. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
15. Pengoordinasian bidang dan UPT;
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perpustakaan, mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang perpustakaan;
2. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia;
3. pengendalian pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, penerimaan, dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam;

4. perumusan kebijakan teknis karya cetak dan karya rekam;
5. pengendalian pelaksanaan kajian pengembangan perpustakaan dan minat baca;
6. pembinaan profesi sumber daya manusia perpustakaan;
7. pengendalian pelaksanaan pemasyarakatan perpustakaan dan peningkatan minat baca;
8. pengendalian pelaksanaan dan pengembangan kerjasama perpustakaan;
9. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

1.2.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang kearsipan, mempunyai fungsi:

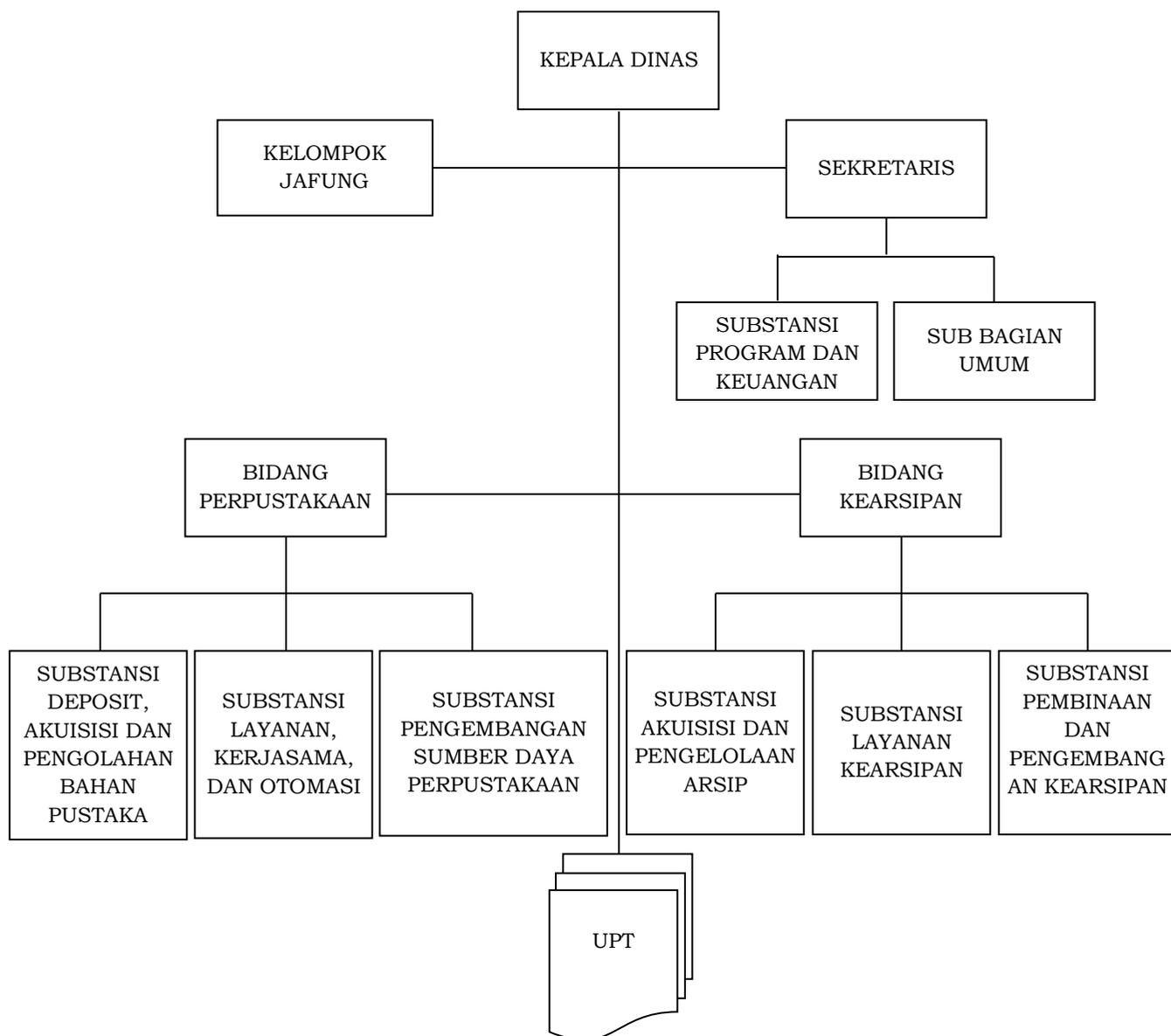
1. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang kearsipan;
2. pembinaan dan pengendalian pelayanan, penilaian, dan penyusutan Arsip Dinamis;
3. pengoordinasian pelaksanaan akuisisi dan pengelolaan arsip dengan Perangkat Daerah lain;
4. pengendalian pengujian autentikasi Arsip Statis dan Arsip media baru;
5. pengoordinasian penyusunan Guide, Daftar Arsip, dan Inventaris Arsip Statis;
6. pengendalian dokumentasi publikasi arsip;
7. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi, sarasehan, ceramah, diskusi, pameran, bimbingan teknis, dan diklat teknis kearsipan;
8. pengoordinasian penerbitan Naskah Sumber Arsip;
9. pengoordinasian jasa layanan, konsultasi dan diseminasi kearsipan;
10. pengoordinasian pengembangan khasanah arsip;
11. pengoordinasian pengembangan sistem layanan arsip berbasis elektronik dan jaringan informasi integrasi kearsipan;
12. pengendalian pengelolaan perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
13. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi berkala akses dan layanan kearsipan;
14. pengoordinasian promosi wisata arsip;
15. pembinaan peningkatan kehandalan Sumber Daya Manusia kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah;
17. pengendalian pelaksanaan pengawasan, audit, dan penilaian hasil pengawasan kearsipan;
18. pengendalikn dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dokumentasi naskah perundang-undangan;

19. pengendalian pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian naskah sumber arsip konvensional dan media baru;
20. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip vital;
21. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kearsipan dinamis;
22. pembinaan kearsipan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi vertikal di Daerah;
23. pembinaan kearsipan lembaga kearsipan Daerah;
24. pelaksanaan kerjasama bidang kearsipan;
25. pembinaan pelaksanaan pengolahan, penataan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, pelestarian, dan pengendalian arsip konvensional dan media baru;
26. pengendalian seleksi naskah sumber arsip yang akan dipublikasikan;
27. pelaksanaan pertimbangan persetujuan pemusnahan arsip;
28. pengoordinasian penerimaan fisik Arsip dan daftar Arsip;
29. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
30. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berdasarkan Berita Acara Nomor 050/023/Dispustakar tanggal 11 Februari 2021 tentang Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN
 BERDASARKAN BERITA ACARA NOMOR 050/023/DISPUSTAKAR
 TANGGAL 11 FEBRUARI 2021**



1.2.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 24 orang ASN dan 18 orang Tenaga Non ASN sampai dengan Desember 2021. Berikut data pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	ASN (orang)		Non ASN (orang)		Jumlah	Keterangan
		L	P	L	P		
1	Pascasarjana/S2	1	-	-	-	1	
2	Sarjana/S1	2	4	-	3	9	
3	Diploma IV	-	-	1	-	1	
4	Diploma III	2	7	1	1	11	
5	Diploma II	-	-	1	-	1	
6	Diploma I	-	-	1	-	1	
7	SLTA	3	5	3	7	18	
	Jumlah	8	16	7	11	42	

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Keterangan
		L	P	
1	Pembina Tk.I/IVb	1	-	
2	Pembina/IVa	1	-	
3	Penata Tk.I/IIIId	1	4	
4	Penata/IIIc	-	-	
5	Penata Muda Tk.I/IIIb	1	4	
6	Penata Muda/IIIa	-	3	
7	Pengatur Tk.I/IIId	2	3	
8	Pengatur/IIc	2	2	
	Jumlah	8	16	

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Keterangan
		L	P	
1	Struktural	2	2	
2	Pustakawan	-	3	
3	Arsiparis	2	4	
4	Pranata Komputer	-	1	
5	Perencana	-	1	
5	Fungsional Umum	4	5	
	Jumlah	8	16	

Guna memaksimalkan pelayanan perangkat daerah perlu dukungan SDM yang memadai, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan tenaga Pustakawan dan Arsiparis secara kuantitatif dan kualitatif dalam menjalankan tugas dan pembinaan pada OPD. Berikut ini adalah kondisi eksisting SDM Disputakar yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Kondisi Eksisting SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Per 31 Desember 2021

No	Jabatan	Ada	Kosong	Keterangan
1	Kepala Dinas		1	Meninggal dunia
2	Sekretaris	1		
3	Eselon III.b			
	1. Kabid Perpustakaan	1		
	2. Kabid Kearsipan	1		
4	Eselon IV.a			
	1. Kasubbag Umum	1		
5	Pustakawan	3	1	

No	Jabatan	Ada	Kosong	Keterangan
6	Arsiparis	6	1	
7	Pranata Komputer	1		
8	Perencana	1		
9	Staf ASN	9		
10	Staf Non ASN	18		
	Jumlah	42	3	

1.2.4 Aspek Strategis

Aspek Strategis seperti halnya pada kebijakan umum untuk meningkatkan akses pelayanan dan budaya baca masyarakat mencakup:

1. Upaya pelayanan
 - a. Peningkatan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Peningkatan kesadaran akan pentingnya arsip;
 - c. Penyelamatan dokumen arsip yang bernilai sejarah;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana kantor
 - e. Peningkatan budaya baca masyarakat
2. Sumber daya manusia
 - a. Tersedianya tenaga Pustakawan dan Arsiparis
3. Manajemen informasi
 - a. Peningkatan pengelolaan manajemen informasi
 - b. Pengembangan sistem informasi

1.3 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi di antaranya adalah:

1. Pembudayaan Minat Baca Masyarakat

Budaya suatu bangsa terbangun selaras dengan budaya literasi masyarakatnya. Faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh proses membaca hasil karya peradaban yang terekam dalam tulisan yang merupakan warisan yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis. Salah satu indikator suatu negara maju ditandai dengan masyarakatnya yang suka dan gemar membaca, karena dengan membaca maka ilmu pengetahuan dapat dikuasai. Sebagai bagian dari upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Balikpapan sebagaimana tercantum pada misi pertama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016–2021, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berperan penting dalam pembudayaan minat baca masyarakat.
2. Sadar Tertib Arsip

Sadar tertib arsip dalam rangka peningkatan kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik serta mendukung program nasional gerakan sadar tertib arsip nasional, perlu dilakukan upaya sadar tertib arsip melalui gerakan sadar tertib arsip di Kota Balikpapan.

Strategi utama gerakan sadar tertib arsip adalah: 1) menjadikan tertib arsip sebagai salah satu bagian penting untuk menjadi perhatian OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan 2) peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan yang terdapat pada OPD; dan 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan yang mendukung perilaku sadar tertib.

**Tabel 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah)	Eksternal (Di Luar Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan publik / pelayanan prima layanan perpustakaan	Fasilitas dan prasarana peralatan dan perlengkapan perpustakaan yang belum memadai	Standar dan syarat ruang layanan dari perpustakaan nasional RI	Sarana dan prasarana, anggaran, dan SDM	Kebijakan anggaran yang diberikan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah	1. Rendahnya SDM di bidang pelayanan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia
Pelayanan publik / Pelayanan prima layanan kearsipan	Pelayanan belum optimal, karena belum ada gedung kearsipan yang memenuhi standar minimal dan terbatasnya jumlah SDM kearsipan	Standar dan syarat ruang layanan dari Arsip Nasional RI, yaitu berupa keputusan kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal	Sarana dan prasarana, anggaran, dan SDM	Perhatian dan arah kebijakan yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan kearsipan, termasuk dalam hal anggaran yang diberikan terhadap Organisasi Perangkat Daerah	1. Gedung pelayanan yang belum tersedia 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah)	Eksternal (Di Luar Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip in aktif dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip			
Peningkatan budaya literasi	Koleksi perpustakaan kurang beragam	Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Koleksi buku, SDM, sarana dan prasarana	Kebijakan anggaran pemerintah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana 2. Terbatasnya anggaran yang tersedia 3. Terbatasnya jejaring perpustakaan
Peningkatan budaya sadar arsip	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti penting arsip dalam penyelenggaraan pemerintah	Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip	SDM, prasarana dan sarana	Kebijakan umum dan Kebijakan anggaran	Gedung depot belum ada, Anggaran terbatas, SDM kurang, sarana, dan sebagainya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah)	Eksternal (Di Luar Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keterbukaan informasi dan komunikasi Bidang Kearsipan	Belum optimalnya keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan kearsipan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	SDM, sarana dan peralatan	Kebijakan daerah dan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah	Belum tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak
Manajemen Tata Kelola Kearsipan	Belum terlaksananya tata kelola kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah dan Nagari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan UU 43 tahun 2009 dan turunannya	Kesiapan SDM, anggaran, sarana prasarana	Kebijakan daerah serta komitmen pimpinan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah	Ketersediaan sarana prasarana, kuantitas dan kualitas SDM

1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
4. Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum Perangkat Daerah, isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan LKjIP, dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran perencanaan strategis, Indikator Kinerja Utama, dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Tabel 2.1 Tujuan dan Rencana Strategis Dispustakar Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Tahun 2016	Target Kinerja				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menggerakkan masyarakat gemar membaca	Laju jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Balikpapan	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	0.53	5	5.5	8.5	9	10
Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu	Perangkat daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Persen	-	5	20	35	50	75
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan nilai IKM yang diperoleh	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.39	90	92	93	94	95

Pada tabel di bawah terlihat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Tabel 2.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dispustakar Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menggerakkan masyarakat gemar membaca	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	1. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
				2. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan 4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					5. Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka
Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Program pengelolaan arsip	1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
				2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
				3. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					5. Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dispustakar Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan khususnya membaca buku-buku	$\frac{\text{kunjungan thn } N - \text{kunjungan } (N - 1)}{\text{kunjungan thn } (N - 1)} \times 100\%$	Jumlah kunjungan/akses ke Perpustakaan (fisik maupun digital) meliputi kunjungan Dispustakar dan perpustakaan-perpustakaan di Kota Balikpapan	Bidang Perpustakaan
2	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Adanya Sistem Informasi Kearsipan yang terintegrasi, OPD akan lebih mudah dalam mengelola arsipnya dan temu kembali arsip lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan dalam pengawasan tata kelola arsip yang tercipta	$\frac{\text{jumlah OPD yang telah mengimplementasikan SIKP}}{\text{jumlah OPD yang ada}} \times 100\%$	Monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan oleh Bidang Kearsipan	Bidang Kearsipan
3	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengetahui tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya	PERMENPAN-RB NO. 16 TAHUN 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian penting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya. Perencanaan kinerja yang dilakukan instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan dengan efisien, sehingga diharapkan akan lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dispustakar Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan minat baca Masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	10
2	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Persen	75
3	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95

2.3.1 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 10.402.307.110,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menjadi Rp. 10.165.759.860,00. Pada tabel berikut ditampilkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis.

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dispustakar Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan minat baca masyarakat	1.295.359.150	12,74%
2	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	649.999.750	6,40%
3	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	8.220.400.960	80,86%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 700/084/TIM-III/ITKOT tanggal 5 Juli 2021 hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang disajikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai 0 s/d 100 dan capaian yang diperoleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan nilai sebesar 65,96% dengan kategori tingkat akuntabilitas kinerja B yang berinterpretasi Baik.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang meliputi 5 (lima) komponen manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Nilai terhadap masing-masing komponen kinerja tersebut di atas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Penilaian Atribut Akuntabilitas Instansi
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2020**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan Kinerja	30	27,17	27,17
2	Pengukuran Kinerja	25	15,94	15,94
3	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,23
4	Evaluasi Internal	10	1,87	1,33
5	Capaian Kinerja	20	13,29	9,29
	Nilai Hasil Evaluasi		70,49	65,96
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	B

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan sebagai rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) namun dalam kondisi tertentu ukuran keberhasilan tujuan dapat direpresentasikan oleh indikator sasaran tahun terakhir dari periode Renstra, sehingga dalam hal ini indikator tujuan disamakan dengan indikator sasaran.

- b. Monitoring rencana aksi dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran kinerja sudah dilakukan namun hanya sampai pada tingkat manajerial.
 - b. Tidak terdapat alur perjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu).
 - c. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
 - d. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
 - e. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya namun belum ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan
 - f. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 - g. IKU telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan.
 3. Pelaporan Kinerja
Cukup memadai
 4. Evaluasi Internal
 - a. Evaluasi program hanya menyajikan informasi pelaksanaan program serta kegiatannya tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.
 - b. Evaluasi program dilakukan hanya sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran.
 - c. Evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan dan rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja.
 - d. Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
 - e. Tidak dilakukan evaluasi dan pemantauan rencana aksi.
 - f. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
 5. Capaian Kinerja
 - a. Semua target pada indikator kinerja baik *output* maupun *outcome* tidak tercapai bahkan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi kinerja serta rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan akan dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelaporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat baca masyarakat
2. Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut di atas masing-masing memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	10	I	-	-	-
					II	-	-	-
					III	-	-	-
					IV	10%	-32,02 %	-320,2 %
2	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Persen	75	I	-	-	-
					II	-	-	-
					III	-	-	-
					IV	75%	75 %	100 %
3	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95	I	-	-	-
					II	-	-	-
					III	-	-	-
					IV	95	81,80	85,35 %

Dari 3 (tiga) sasaran strategis hanya 1 (satu) yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan pada uraian berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan minat baca masyarakat

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	10 %	-32,02 %	-320,2 %

Di tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan memproyeksikan adanya peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan sebesar 10% dari tahun 2020. Jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020 sebanyak 21.744 orang, diharapkan jumlah kunjungan pada tahun 2021 mencapai angka 23.919 orang. Pada kenyataannya jumlah kunjungan pada tahun 2021 hanya mencapai 14.782 orang. Dibandingkan dengan jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 32,02% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ peningkatan kunjungan perpustakaan} &= \frac{\text{kunjungan 2021} - \text{kunjungan 2020}}{\text{kunjungan 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{14.782 - 21.744}{21.744} \times 100\% \\ &= -32,02\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang juga mengalami penurunan jumlah kunjungan sebesar -75% dari tahun 2019, penurunan di tahun 2021 ini relatif lebih rendah. Pebandingannya terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Indikator Sasaran	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	-75 %	-32,02 %	-57,31 %

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas jelas bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan masih mengalami penurunan. Faktor utama yang mempengaruhi penurunan kunjungan perpustakaan adalah masih adanya pandemi Covid-19 yang pada tahun 2021 di hampir semua daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Balikpapan, memasuki gelombang kedua yaitu masuknya Covid-19 varian Delta. Dengan tingkat penyebaran yang lebih cepat dari varian Delta ini mendorong pemerintah terus menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dampak dari kebijakan PPKM di Kota Balikpapan ini pada layanan perpustakaan adalah:

1. Pembatasan jam layanan perpustakaan

Sebelum Pandemi Covid-19		Sesudah Pandemi Covid-19	
Senin-Kamis	: 08.00 – 18.00 wita	Senin-Kamis	: 08.30 – 14.00 wita
Jumat	: 08.00 – 16.00 wita	Jumat	: 08.30 – 11.00 wita
Sabtu-Minggu	: 10.00 – 14.00 wita	Sabtu, Minggu, dan	
Hari Libur Nasional	Tutup	Hari Libur Nasional	Tutup

Pada saat pandemi berlangsung, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan harus merubah jam layanan perpustakaan sesuai kebijakan PPKM yang

diberlakukan di Kota Balikpapan. Jam layanan perpustakaan menjadi lebih singkat dan dilakukan penutupan layanan di hari Sabtu dan Minggu sehingga jumlah kunjungan ke perpustakaan juga berkurang.

2. Pembatasan jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan

Dalam kebijakan PPKM yang diberlakukan di Kota Balikpapan, salah satunya mengatur mengenai kapasitas maksimal gedung perkantoran yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat yaitu 50%. Kebijakan tersebut mewajibkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan juga membatasi jumlah kunjungan dengan memberlakukan nomor antrian bagi pemustaka yang akan masuk ke ruang layanan perpustakaan. Di sisi lain, PPKM juga menyebabkan masyarakat membatasi diri untuk beraktifitas di luar rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak. Dua hal ini tentunya menyebabkan kunjungan ke perpustakaan menjadi semakin berkurang.

3. Membuka layanan *online*

Salah satu alternatif agar pelayanan perpustakaan tetap berjalan terutama dalam menyediakan bahan bacaan kepada masyarakat adalah dengan aplikasi perpustakaan digital iBalikpapan. Sayangnya jumlah pengguna yang memanfaatkan koleksi di iBalikpapan juga tidak menunjukkan perbaikan. Di tahun 2020 jumlah anggota aktif yang memanfaatkan koleksi di iBalikpapan sebanyak 788 pengguna, sedangkan pada tahun 2021 justru menurun menjadi 414 pengguna. Hal ini disebabkan masih kurang dikenalnya aplikasi iBalikpapan karena sosialisasi iBalikpapan kepada masyarakat belum digencarkan.

Sasaran 2: Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	75 %	75 %	100 %

Capaian kinerja sasaran kedua Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 menunjukkan ada peningkatan yang signifikan. Di tahun 2020 realisasi pada indikator sasaran ini sebesar 10%, di tahun 2021 realisasi sebesar 75%. Jika dibandingkan menunjukkan peningkatan sebesar 550% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	10 %	75 %	550 %

Sasaran 3: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	81,80	83,35 %

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan terhadap layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menunjukkan nilai 81,80. Hasil ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 95 atau hanya mencapai 83,35% saja.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,05	81,80	-7,57 %

Dibandingkan dengan hasil IKM tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 7,57%, dari nilai 88,05 menjadi 81,80. Sayangnya sampai dengan dokumen LKjIP ini dibuat, dokumen penilaian IKM yang menyajikan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan terhadap masyarakat belum diterbitkan sehingga belum bisa dianalisis faktor-faktor penyebab penurunan nilai IKM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah diukur melalui pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perpustakaan dan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar Rp. 10.165.759.860,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.137.259.273,00 atau sebesar 80,05%.

Pada 2 (dua) tabel di bawah ini diuraikan realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan rincian realisasi anggaran tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan minat baca masyarakat	10%	-32,02%	-320,2%	1.295.359.150	1.172.550.378	90,52
2	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	75%	75%	100%	649.999.750	569.219.280	87,57
3	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	95	81,80	83,35 %	8.220.400.960	6.395.489.615	77,80
Jumlah					10.165.759.860	8.137.259.273	80,05

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.295.359.150	1.172.550.378	90,52%	
1.1	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.000.000	140.509.359	84,64%	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	166.000.000	140.509.359	84,64%	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.129.359.150	1.032.041.019	91,38%	
1.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	152.800.000	141.917.589	92,88%	
1.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	527.916.900	474.920.250	89,96%	
1.2.3	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	67.641.650	59.423.130	87,85%	
1.2.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
1.2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	381.000.600	355.780.050	93,38%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	649.999.750	569.219.280	87,57%	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	208.844.470	83,54%	
2.1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	250.000.000	208.844.470	83,54%	
2.2	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	279.999.750	263.463.050	94,09%	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	99.999.750	92.611.050	92,61%	
2.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	180.000.000	170.852.000	94,92%	
2.3	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	96.911.760	80,76%	
2.3.1	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	120.000.000	96.911.760	80,76%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.220.400.960	6.395.489.615	77,80%	
3.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.761.674	362.365.325	77,80%	
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.574.967	172.785.358	67,34%	
3.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.045.000	29.565.090	62,84%	
3.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.997.707	49.769.280	99,54%	
3.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.144.000	10.324.600	85,02%	
3.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	99.920.997	99,92%	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.425.541.750	3.480.866.590	78,65%	
3.2.1	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	4.425.541.750	3.480.866.590	78,65%	
3.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.542.105.936	1.937.746.668	76,23%	
3.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	389.300.379	64,88%	
3.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.942.105.936	1.548.446.289	79,73%	
3.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.4.3	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.991.600	575.743.582	78,65%	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.000.000	184.607.421	99,79%	
3.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			
3.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.992.000	257.237.300	73,50%	
3.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.277.400	36.256.570	49,48%	
3.5.5	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.722.200	97.642.291	78,92%	
3.6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.6.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Rasionalisasi anggaran
3.7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	55.000.000	38.767.450	70,49%	
3.7.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-		Rasionalisasi anggaran

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.7.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	550.000	5,50%	
3.7.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000	38.217.450	84,93%	
Jumlah		10.165.759.860	8.137.259.273	80,05%	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

LKjIP ini disusun sesuai dengan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Lembaga, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2021 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2021.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

4.2 Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan untuk tahun-tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perpustakaan

- a. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan rumah ibadah relatif rendah;
- b. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. SDM pengelola perpustakaan terbatas;
- d. Eksistensi kelembagaan dan pendanaan perpustakaan daerah sangat tergantung pada Pemerintah Kota;
- e. Belum optimalnya layanan perpustakaan daerah;
- f. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kota Balikpapan;
- g. Kurangnya animo masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan;
- h. Perpustakaan digital belum dikenal luas oleh masyarakat;
- i. Masih banyak perpustakaan binaan yang belum mengelola perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

2. Urusan Kearsipan

- a. Lembaga Kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi, dan penelitian;
- b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit;
- d. Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip;
- e. Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip di instansi pencipta arsip belum terpenuhi sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan;
- f. Rendahnya tingkat kesadaran pencipta arsip dalam mengelola dan menyelamatkan arsip.

Terhadap kondisi tersebut strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Urusan Perpustakaan

- a. Menjadwalkan pembinaan terhadap berbagai perpustakaan yang ada di wilayah Kota Balikpapan secara bertahap;
- b. Menambah ragam koleksi bahan pustaka baik yang tercetak maupun digital;
- c. Mengusulkan penambahan SDM pengelola perpustakaan;
- d. Bekerja sama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan;
- e. Meningkatkan sosialisasi maupun publikasi mengenai layanan-layanan perpustakaan yang tersedia.

2. Urusan Kearsipan

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kearsipan secara langsung kepada Perangkat Daerah yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku, agar kedepannya Perangkat Daerah bisa melaksanakan pengelolaan arsip sampai pada tahap penyusutan;
- b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan kearsipan terhadap Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan bimtek kearsipan bagi petugas kearsipan Perangkat Daerah agar dapat memberikan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan;
- d. Meningkatkan kompetensi arsiparis melalui bimtek maupun diklat yang diadakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Balikpapan, Maret 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,



SUTADI
Pembina Utama Muda